

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Guna mencapai cita-cita bangsa tersebut diselenggarakan pembangunan nasional di semua bidang kehidupan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terpadu dan terarah. Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.

Pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut semua segi kehidupan, baik fisik, mental maupun sosial ekonomi. Dalam perkembangan pembangunan kesehatan selama ini, telah terjadi perubahan orientasi, baik tata nilai maupun pemikiran. Terutama mengenai upaya pemecahan masalah di bidang kesehatan yang dipengaruhi oleh politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan orientasi tersebut akan mempengaruhi proses penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Kesehatan merupakan hak azasi setiap manusia dimanapun berada. Manifestasi dari hal tersebut diwujudkan dalam pembangunan yang komprehensif dan berkesinambungan. Pembangunan kesehatan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Demikian halnya dengan hak tenaga kerja yang bekerja pada sector formal dan informal. Perusahaan-perusahaan dan lingkungannya perlu memenuhi syarat-syarat kesehatan tertentu secara minimal, agar supaya para pekerja tidak mudah mengalami bahaya yang ditimbulkan oleh bahan-bahan kimia atau faktor-faktor biologis tertentu dan dapat bekerja dalam ruangan dan suasana yang kondusif.

Tenaga kerja baik perempuan dan laki-laki merupakan unsur produktif yang sangat penting bagi pembangunan sehingga perlu diberi perlindungan, ditingkatkan dan dikembangkan kemampuannya. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 86 ayat (1) menentukan: “ setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”.

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. Pasal 5 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa “ Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi

untuk memperoleh pekerjaan”. Pernyataan ini sama seperti pernyataan dalam pasal 27 ayat (2) dan pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang intinya adalah setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.¹

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat martabat dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil makmur dan merata baik materiil maupun spiritual.

Pekerjaan merupakan hak bagi setiap orang, maka tidak boleh ada orang yang menghalangi hak tersebut dengan cara membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama dan aliran politik. Pasal 6 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa setiap pekerja/buruh memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.²

Begitu pula halnya dengan tenaga kerja wanita. Mereka dapat bekerja dalam banyak bidang yaitu pendidikan, sosial, politik maupun hiburan. Diantara sekian banyak profesi yang bias digeluti wanita dalam mencari nafkah, ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang mewajibkan wanita tersebut untuk bekerja di lingkungan yang tidak seharusnya dan kurang kondusif baik bagi dirinya maupun kesehatannya.

¹ Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm.7

² Ibid.

Perlindungan terhadap wanita sehubungan dengan ketenagakerjaan yang diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdapat pada pasal 49, yang menyatakan:

- a. Wanita berhak untuk memilih, dipilih dan diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan;
- b. Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita;
- c. Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.³

Selain itu, didalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan kerja diatur dalam pasal 164 ayat (1) yang berbunyi: " Upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan". Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian di PT. Borneo Melintang Buana Yogyakarta, dengan judul : PERLINDUNGAN KESEHATAN PEKERJA WANITA MENURUT PASAL 81 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DI PT. BORNEO MELINTANG BUANA YOGYAKARTA (PT. BMB).

³ Ibid., hlm. 81

B. Rumusan Masalah:

1. Mengapa pekerja wanita di PT. BORNEO MELINTANG BUANA YOGYAKARTA (PT BMB) tidak mempergunakan cuti haid yang diatur dalam PKB secara maksimal ?
2. Bagaimanakan sosialisasi PKB terhadap perkerja di PT BMB khususnya mengenai aturan tentang cuti haid ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan mengapa semua pekerja wanita yang ada di PT. BMB tidak mempergunakan hak cuti haidnya.
2. Untuk mengetahui sejauhmana efektifitas dan pelaksanaan dari PKB yang mengatur tentang cuti haid yang sebelumnya telah disosialisasikan oleh Serikat Pekerja PT. BMB.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat :

1. Bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan bidang hukum kesehatan pada khususnya tentang perlindungan kesehatan pekerja wanita agar dengan penulisan hukum ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan.
2. Dengan adanya penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada mahasiswa dan para pekerja khususnya pekerja perempuan tentang hak yang telah diatur dalam peraturan.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini yang berjudul PERLINDUNGAN KESEHATAN PEKERJA WANITA MENURUT PASAL 81 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DI PT. BORNEO MELINTANG BUANA YOGYAKARTA (PT. BMB), merupakan karya asli penulis bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari karya penulis lain. Skripsi ini berbeda dengan skripsi-skripsi yang telah ada karena dalam skripsi ini dibahas mengenai bagaimana pekerja wanita di PT BMB mempergunakan cuti haid yang telah diatur dalam PKB dan tentang sosialisasi PKB terhadap pekerja di PT BMB khususnya mengenai aturan tentang cuti haid. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan karya duplikasi maupun plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atas sanksi hukum yang berlaku.

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan berarti tempat berlindung, perbuatan melindungi, pertolongan dan penjagaan.⁴

2. Kesehatan

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan, Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

⁴ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1999

3. Pekerja/buruh

Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan, Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

4. Wanita

Wanita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perempuan dewasa.⁵

5. Perseroan Terbatas

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas; Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau melukiskan apa yang dinyatakan

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Edisi Ketiga, hlm.1268.

oleh narasumber secara tertulis dan lisan serta tingkah laku yang nyata yang diteliti dan dipelajari secara utuh.⁶

2. Sumber Data

Data penelitian terdiri dari data primer, sekunder dan tersier

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber dengan cara wawancara langsung. Menurut Soerjono Soekanto data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu pekerja.⁷

b. Data Sekunder yaitu data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

a) Undang-Undang Dasar 1945

b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

2) Bahan Hukum Sekunder meliputi literatur yang berkaitan dengan kesehatan dan ketenagakerjaan serta literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan judul penulisan hukum ini.

3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang menerangkan tentang arti kata dalam penelitian ini

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.250

⁷ Ibid, hlm.12

a) Kamus Besar Bahasa Indonesia

b) Kamus Bahasa Inggris

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang diperlukan, penulis akan menggunakan metode sebagai berikut :

a. Studi lapangan dengan menggunakan :

Wawancara yaitu suatu proses komunikasi untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada narasumber yang tujuannya untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

b. Studi pustaka

Yaitu mempelajari dan memahami berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di PT BMB Ekspor yang beralamat di Jalan Magelang Km. 14, Komplek Industri Catur Harjo, Sleman, Yogyakarta

5. Responden dan Narasumber

a.) Responden

Responden yang terkait dalam penelitian ini adalah para pihak yang dianggap mempunyai hubungan yang erat dengan masalah yang diteliti yaitu: para pekerja wanita di PT. BMB yang tidak mengambil cuti haid. Responden yang diambil sejumlah 8 orang

pekerja wanita PT. BMB. Jumlah ini dianggap sudah mewakili 10% dari semua jumlah pekerja wanita di PT. BMB yang seluruhnya berjumlah 70 orang pekerja (jumlah total pekerja 275 orang). Sedangkan pekerja wanita yang tidak diambil sebagai responden yaitu sebanyak 62 orang.

b.) Narasumber

1. Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) PT BMB
2. Ketua Serikat Pekerja PT. BMB
3. Kepala Disnaker Kabupaten Sleman
4. Yupi Aisyah: Aktivis Perempuan dan Sekretaris SPSI NIBA

H. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara analisis kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh narasumber secara lisan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁸

Analisis ini menggunakan metodologi berfikir induktif yaitu menarik kesimpulan dengan proses awal yang khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir sebagai suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa asas umum.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terdiri dari tiga bab, yaitu

⁸ Ibid, hlm.32

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep dan Metode Penelitian.

BAB II PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan diuraikan dari hasil penelitian yaitu:

1. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Kesehatan Pekerja Wanita yang diuraikan lagi menjadi: pengertian tentang perlindungan kesehatan, pengertian tentang haid, pengertian tentang hak cuti haid,
2. Tinjauan tentang Hubungan Kerja, Serikat Pekerja dan Perjanjian Kerja Bersama yang akan diuraikan lagi menjadi: pengertian hubungan kerja, subyek hukum dalam hubungan kerja, obyek hukum dalam hubungan kerja, pengertian Perjanjian kerja Bersama, pengertian Serikat Pekerja.
3. Hasil penelitian yang meliputi tinjauan tentang PT. Borneo Melintang Buana Yogyakarta, perlindungan kesehatan pekerja wanita di PT. BMB terkait dengan pengambilan cuti haid, dan sosialisasi PKB di lingkungan PT. BMB.

BAB III PENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran. Untuk melengkapi bahan penulisan hukum ini dicantumkan daftar kepustakaan.